



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI



(PENGADUAN MASYARAKAT)
TRIWULAN I
Januari–Maret 2026



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2026**

Alamat :Gedung Klaster II Jln. Bayangkara No. 12 telp. (0373) 2723175

KATA PENGANTAR

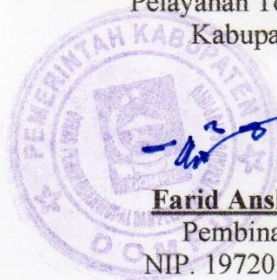
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.

Bahwa Laporan Pengaduan Masyarakat ini merupakan dokumen implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memperoleh gambaran secara Komprehensif mengenai Jumlah Pengaduan yang masuk dan ditindak lanjuti di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu yang masuk melalui Saluran Pengaduan yang ada saat ini sebagai bentuk Penyaluran Aspirasi Masyarakat akan Layanan yang diterima dan juga sebagai bahan Evaluasi Perbaikan atas layanan yang diberikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.

Demikian Laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran data dan informasi terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dompu, 31 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Dompu,



Farid Anshari, SE., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197205252002121012

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, maka Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat dalam melakukan Pelayanan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah merupakan wujud nyata dari amanat undang-undang tersebut. Apalagi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang Menyangkut penataan kembali pada sistem Pelayanan dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global di semua lini baik dari Kementrian/Lembaga sampai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sejauh ini pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu dirasakan sudah cukup memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari pemberian bantuan atau Help Deks dengan layanan prima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu, tidak ada atau minimnya keluhan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung maupun melalui media elektronik (telepon, email, facebook, instagram dan website) tentu menjadi bukti nyata layanan yang diberikan oleh kami kepada masyarakat sangat optimal, hal ini menjadikan semangat untuk kami (DPMPTSP) dalam terus melakukan evaluasi dan terus meningkatkan pelayanan publik yang prima dalam terus menjaga kepercayaan masyarakat Kabupaten Dompu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu sebagai penyelenggara layanan publik akan terus lebih meningkatkan kinerja layanannya baik dari segi layanan informasi, konsultasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk mewujudkan kepuasan pelayanan perizinan kepada masyarakat
2. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan.
3. Menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola
4. Penanganan pengaduan perizinan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.
5. Membangun sistem pengelolaan pengaduan secara terintegrasi.

D. RUANG LINGKUP

Pengaduan Masyarakat yang di terima oleh Tim Pengaduan DPMPTSP melalui berbagai saluran pengaduan yang tersedia, terhitung sejak Januari s/d Maret 2026 sejumlah 5 Pengaduan. dan pengaduan telah ditindak lanjuti.

Ruang lingkup pengaduan masyarakat dalam kurun waktu 3 bulan tahun 2025 meliputi:

1. Persyaratan Layanan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/Tarif Layanan;
5. Hasil atau Produk Layanan;
6. Kompetensi Petugas;
7. Perilaku Petugas Layanan;
8. Sarana dan Prasarana;
9. Lain-lain.

BAB II

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. MEKANISME PENGADUAN

Pada era digital ini banyak hal yang berubah diantaranya percepatan informasi, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya kolaborasi dan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu dengan melakukan sejumlah peningkatan dalam pelayanan publik. Adapun mekanisme penanganan pengaduan informasi:

1. Pemohon/masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui lisan/tatap muka, tertulis, media sosial, dan website.
2. Petugas/staf informasi dan pengaduan menerima laporan pengaduan dari masyarakat, terhadap pengaduan yang disampaikan secara lisan untuk mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan.
3. Kasi Pelaporan dan Pengawasan melakukan verifikasi dan memilah laporan masyarakat untuk ditangani dan disampaikan pada kepala bidang Pelayanan Perizinan.
4. Kepala bidang Pelayanan Perizinan, mengkoordinasikan pada Bidang penanaman Modal dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas PMPTSP dan
5. Apabila diperlukan untuk melakukan peninjauan lokasi, Kepala bidang Pelayanan Perizinan bersama Tim akan melakukan peninjauan lokasi dan hasil peninjauan disampaikan pada Kepala Dinas PMPTSP.
6. Kepala Dinas PMPTSP mengkoordinasikan pada Dinas Teknis, terkait dengan obyek yang dilaporkan oleh masyarakat, untuk proses penyelesaian.
7. Kepala Dinas PMPTSP menyampaikan Hasil Penanganan Pengaduan pada pemohon.



B. TIM PENGELOLA

Tim Pelaksana kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu masuk dalam Tim Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu Nomor 800/27/DPM-PTSP/2025 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu Tahun 2025.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu dihitung mulai bulan Januari s/d Maret 2026, sebagai upaya untuk mengakomodir semua Laporan Pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti baik yang menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan Konsultasi Bidang Usaha dan Layanan Bantuan OSS di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu.

D. MEDIA PENANGAN

Adapun media yang digunakan untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di DPMPTSP Kabupaten Dompu yaitu melalui media telpon, email, website, Facebook, Tiktok, Instagram ataupun langung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu dengan mengisi formulir pengaduan dengan melampirkan Fotocopy Kartu Identitas Diri (KTP) Pemohon.

E. PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu memiliki kewajiban untuk melaksanakan penanganan seluruh aduan dari masyarakat terkait permasalahan perizinan dan nonperizinan yang pengelolaannya menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu serta berkomitmen untuk menangani seluruh aduan masyarakat yang masuk ke saluran pengaduan yang ada. Secara umum, layanan pengaduan perizinan yang masuk dan ditindaklanjuti selama bulan Januari s/d Maret 2026 sebagaimana terlamir dalam laporan ini.

BAB III
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. MONITORING PENGADUAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil monitoring pengaduan yang masuk pada bulan Januari s/d Maret 2026 terdapat aduan masyarakat yang masuk di saluran pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu sebagai berikut:

Bulan : Januari 2026							
No	MEDIA PENGADUAN	NAMA PELAPOR PENGADUAN	TANGGAL	ALAMAT TERLAPOR	ISI PENGADUAN	RENCANA PENYELESAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Instagram	PT. ADP Bumi Raya	19 Januari 2026	Desa Calabai Kecamatan Pekat	Lupa Katasandi untuk login OSS PT. ADP Bumi Raya (NIB 1253000452899)	Menyerahkan berkas pengaduan pada operator Layanan Bantuan OSS, Melakukan pengecekan aktivitas perusahaan, Membuatkan Permohonan Perubahan (Lupa Pasword)	3 Hari
2	Website	Hardianti	26 Januari 2026	Desa Malaju Kecamatan Kilo	Saya lupa user dan password ijin usaha, mohon dibantu supaya bisa tambah usaha lain	Menyerahkan berkas pengaduan pada operator Layanan Bantuan OSS, Membuatkan Permohonan Perubahan (Lupa Pasword),	3 Hari

Bulan : Februari 2026							
No	MEDIA PENGADUAN	NAMA PELAPOR PENGADUAN	TANGGAL	ALAMAT TERLAPOR	ISI PENGADUAN	RENCANA PENYELESAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Website	Candradinata	03 Februari 2026	Dusun Rasa Nae Selatan Baka Jaya	Mohon dibantu untuk melakukan perubahan dan permohonan akun oss, karna saya lupa (UD. Baka Jaya)	Menyerahkan berkas pengaduan pada operator Layanan Bantuan OSS, Melakukan pengecekan aktivitas perusahaan, Membuatkan Permohonan Perubahan (Lupa Pasword)	3 Hari

Bulan : Maret 2026							
No	MEDIA PENGADUAN	NAMA PELAPOR PENGADUAN	TANGGAL	ALAMAT TERLAPOR	ISI PENGADUAN	RENCANA PENYELESAIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Sp4n Lapor	Eni Handayani	05 Maret 2026	Desa Calabai Kecamatan Pekat	Ibu Eni Handayani memohon bantuan DPMPSTP terkait aktivasi akun OSS mandiri yang belum mendapat balasan dari kontak pusat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan berkas pengaduan pada operator Layanan Bantuan OSS 2. Membuatkan Permohonan Perubahan (Lupa Password) 3. Menerima balasan email dari OSS Riset Password Berhasil dilakukan 	3 Hari
2	Sp4n Lapor	Fita Liana	12 Maret 2026	Desa Jala Kecamatan Hu'u	Saya ingin mengadu terkait kesalahan alamat pada surat izin penelitian yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, ditemukan bahwa terdapat kekeliruan dalam	Menerima dan mencatat pengaduan dari pemoho, Pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen permohonan, Ditemukan adanya kesalahan penulisan alamat lokasi penelitian pada surat tersebut, Melakukan perbaikan data sesuai dengan alamat yang benar berdasarkan dokumen permohonan ,	3 Hari

					penulisan alamat lokasi penelitian sehingga tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya;	Menerbitkan kembali surat izin penelitian yang telah diperbaiki	
--	--	--	--	--	---	---	--

B. JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2025

1. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Rekapitulasi Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Dompu dari mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2026.

No	Bulan	Laporan Diterima	Laporan Diselsaikan
1	Januari	2	2
2	Februari	1	1
3	Maret	2	2
Jumlah Pengaduan		5	5

2. Status Penanganan Pengaduan Perizinan

Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Dompu dari mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2026 telah menerima pengaduan sebanyak 5

permasalahan dengan status penanganan pengaduan perizinan sebagai berikut :

NO	STATUS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Selesai	5	100%
2	Proses	-	-
JUMLAH		5	100%

3. Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPTSP per saluran selama kurun waktu tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram dibawah ini :

NO	SALURAN PENGADUAN	JUMLAH
1	Tatap muka / Lisan	-
2	Tertulis / surat menyurat	-
3	Formulir Pengaduan	-
4	Website DPMPTSP	2
5	E-mail DPMPTSP	-
6	Instagram (IG) DPMPTSP	1
7	Telepon Kantor	-
8	Facebook DPMPTSP	-
9	Tiktok DPMPTSP	-
10	SP4NLAPOR DPMPTSP	2
10	Rapat Koordinasi	-
10	Instruksi Pimpinan	-
JUMLAH		5

C. HAMBATAN

Hambatan dalam pelaksanaan penanganan permasalahan pengaduan di Triwulan I tahun 2026 diantaranya yaitu :

- a. Kurangnya pengetahuan Masyarakat Kabupaten Dompu tentang informasi Layanan Pengaduan Perizinan sehingga banyak masyarakat atau pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya layanan Pengaduan;
- b. Belum adanya pelatihan khusus terkait Penanganan Pengaduan Perizinan.

D. UPAYA PENYELESAIAN

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penanganan pengaduan diantaranya:

1. Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengoptimalan anggaran promosi pengaduan;
2. Mengoptimal Publikasi dan sosialisasi Layanan Pengaduan Perizinan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu;
3. Telah tersedianya Publikasi informasi layanan pengaduan yang dipublikasikan di media sosial dan HelpDeks Layan pengaduan langsung;
4. Melakukan koordinasi secara rutin terkait validasi data pengaduan oleh petugas layanan pengaduan;

BAB III

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Penanganan Pengaduan Perizinan ini ditangani oleh Substansi Pengendalian Pengaduan Perizinan beserta Tim Teknis terkait.

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan Triwulan I di tahun 2026 sebanyak 5 permasalahan dengan status permasalahan **Selesai**.

B. SARAN

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan ini menyajikan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan selama tiga bulan (I triwulan) yang memuat atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Layanan Pengaduan ke depannya.

Pelaksanaan layanan publik yang diberikan diharapkan dapat terus di pertahankan dan di tingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik antar Subtansi Pengaduan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu khususnya petugas layanan informasi, konsultasi dan pengaduan serta petugas dan pejabat back office begitu juga halnya dengan petugas tim teknis dari Dinas yang ditujuk. Selain itu perlu terus dilakukan sosialisasi dan informasi yang berkelanjutan ke masyarakat ataupun pelaku usaha agar usaha atau kegiatan yang dilakukan setiap warga masyarakat sudah dilengkapi izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

LAMPIRAN
FORM PENGADUAN



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat :Gedung Klaster II Jln. Bayangkara No. 12 telp. (0373) 2723175
Email : dpmptspkab.dompus@gmail.com Web : <http://dpmptsp.dompukab.go.id>



FORMULIR PENGADUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

No hp :

Dengan ini menyampaikan pengaduan sebagai berikut :

I. JENIS PENGADUAN :

- 1.
- 2.

II. LOKASI USAHA :

.....

III. TINDAKAN YANG DIHARAPKAN :

- 1.
- 2.

Demikian kami sampaikan pengaduan ini dengan sebenar-benarnya, dan apabila pengaduan ini tidak benar kami siap menerima sanksi/hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dompus,...../...../2026

Yang menyampaikan pengaduan



Gambar.1
Layanan Informasi dan Pengaduan



Gambar.2
Layanan Penerima Pengaduan



Gambar.3
Layanan Bantuan Penyelesaian Permasalahan Perizinan

Rekap Laporan Pengaduan

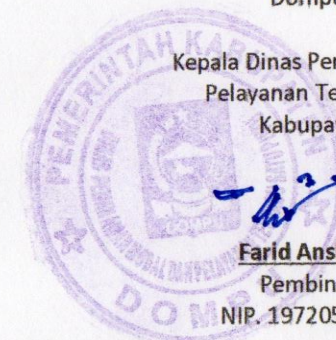
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu Tahun 2026

No	Nama/Perusahaan	Waktu Pengaduan		Alamat	Sarana Pengaduan	Uraian Pengaduan	Tanggal Tindak Lanjud	Tindak Lanjud Pengaduan	
		Tanggal	Jam					Hasil	
1	PT. ADP Bumi Raya	19 Januari 2026	13.00	Desa Calabai Kecamatan Pekat	Instagram	Lupa Katasandi untuk login OSS PT. ADP Bumi Raya (NIB 1253000452899)	20 Januari 2026	1	Menyerahkan berkas pengaduan pada operator Layanan Bantuan OSS
								2	Melakukan pengecekan aktivitas perusahaan
								3	Membuatkan Permohonan Perubahan (Lupa Password)
								4	Menerima balasan email dari OSS Riset Password Berhasil dilakukan
								5	Selsai ditangani
2	Hardianti	26 Januari 2026	10.00	Desa Malaju Kecamatan Kilo	Website	Saya lupa user dan password ijin usaha, mohon dibantu supaya bisa tambah usaha lain	27 Januari 2026	1	Menyerahkan berkas pengaduan pada operator Layanan Bantuan OSS
								2	Membuatkan Permohonan Perubahan (Lupa Password)
								3	Menerima balasan email dari OSS Riset Password Berhasil dilakukan
								4	Selsai ditangani
3	Candradinata	3 Februari 2026	11.20	Dusun Rasa Nae Selatan Baka Jaya	Website	Mohon dibantu untuk melakukan perubahan dan permohonan akun oss, karna saya lupa (UD. Baka Jaya)	3 Februari 2026	1	Menyerahkan berkas pengaduan pada operator Layanan Bantuan OSS
								2	Melakukan pengecekan aktivitas perusahaan
								3	Membuatkan Permohonan Perubahan (Lupa Password)
								4	Menerima balasan email dari OSS Riset Password Berhasil dilakukan
								5	Selsai ditangani

4	Eni Handayani	5 Maret 2026	14.37	Desa Calabai Pekat	Sp4n Lapor	Ibu Eni Handayani memohon bantuan DPMPTSP terkait aktivasi akun OSS mandiri yang belum mendapat balasan dari kontak pusat.	5 Maret 2026	1	Meneruskan pengaduan pada operator Layanan Bantuan OSS
								2	Melakukan Pendaftaran Ulang
								3	Menunggu Aktivasi OSS
								4	Mendapatkan Aktivasi OSS dan Login
								5	Selsai ditangani
5	Fita Líana	12 Maret 2026	13.50	Desa Jala Kecamatan Hu'u	Sp4n Lapor	Telah diterima pengaduan terkait kesalahan alamat pada surat izin penelitian yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, ditemukan bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan alamat lokasi penelitian sehingga tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya	12 Maret 2026	1	Menerima dan mencatat pengaduan dari pemoho
								2	Pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen permohonan
								3	Ditemukan adanya kesalahan penulisan alamat lokasi penelitian pada surat terse
								4	Melakukan perbaikan data sesuai dengan alamat yang benar berdasarkan dokume
								5	Menerbitkan kembali surat izin penelitian yang telah diperbaiki

Dompu, 31 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Dompu,



Farid Anshari, SE., M.Si

Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197205252002121012